

# AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Ari Purwati, Wildoms Sahusilawane, Lia Dama Yanti,  
Yunia Oktari, Lilis Setyowati, Ikhyanuddin, Sugianto,  
Ernawaty Usman, Samalua Waoma, Asri Ady Bakri,  
Ngurah Pandji Mertha Agung Durya, Rini Novianti, Umi Nandiroh,  
Catur Ragil Sutrisno, Edy Susanto, Ummu Kalsum

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi Sektor Publik adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan tentang entitas yang beroperasi di sektor publik, seperti pemerintah, lembaga publik, dan organisasi nirlaba yang menerima dana publik. Konsep dasar Akuntansi Sektor Publik bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik serta memberikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan.

Buku ini membahas tentang Konsep Dasar Akuntansi Sektor Publik, Sejarah Akuntansi Sektor Publik, Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Manajemen Sektor Publik, Penganggaran Sektor Publik, Analisis Investasi, Penentuan Harga Pelayanan Publik, Pengukuran Kinerja, Laporan Keuangan Pemerintahan, Audit Sektor Publik, Akuntansi Untuk Partai Politik, Akuntansi Untuk Tempat Ibadah, Akuntansi Untuk Bidang Pendidikan, Akuntansi Untuk Yayasan Sosial dan LSM, Akuntansi Untuk Lembaga Kesehatan, Problematika Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.



# **Akuntansi Sektor Publik**

## **UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggunaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggunaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# Akuntansi Sektor Publik

Ari Purwati | Wildoms Sahunilawane | Lia Dama Yanti|  
Yunia Oktari| Lilis Setyowati| Ikhyanuddin| Sugianto|  
Ernawaty Usman| Samalua Waoma| Asri Ady Bakri|  
Ngurah Pandji Mertha Agung Durya| Rini Novianti |  
Umi Nandiroh| Catur Ragil Sutrisno|  
Edy Susanto| Ummu Kalsum



# Akuntansi Sektor Publik

## Penulis:

Ari Purwati | Wildoms Sahusilawane | Lia Dama Yanti | Yunia Oktari | Lilis Setyowati | Ikhyanuddin | Sugianto | Ernawaty Usman | Samalua Waoma | Asri Ady Bakri | Ngurah Pandji Mertha Agung Durya | Rini Novianti | Umi Nandiroh | Catur Ragil Sutrisno | Edy Susanto | Ummu Kalsum

## Editor:

Andi Asari, M.A & Krisdiyanto S.IP.

## Desainer:

Tim Mafy

## Sumber Gambar Cover:

[www.freepik.com](http://www.freepik.com)

## Ukuran:

viii, 228 hlm, 15 cm x 23 cm

## ISBN:

978-623-8470-38-9

## Cetakan Pertama:

November 2023

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

## **PENERBIT PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA**

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: [www.penerbitmafya.com](http://www.penerbitmafya.com)

E-mail: [penerbitmafya@gmail.com](mailto:penerbitmafya@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

---

**Segala puji syukur** kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Akuntansi Sektor Publik. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Konsep Dasar Akuntansi Sektor Publik, Sejarah Akuntansi Sektor Publik, Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Manajemen Sektor Publik, Penganggaran Sektor Publik, Analisis Investasi, Penentuan Harga Pelayanan Publik, Pengukuran Kinerja, Laporan Keuangan Pemerintahan, Audit Sektor Publik, Akuntansi Untuk Partai Politik, Akuntansi Untuk Tempat Ibadah, Akuntansi Untuk Bidang Pendidikan, Akuntansi Untuk Yayasan Sosial dan LSM, Akuntansi Untuk Lembaga Kesehatan, Problematika Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis, 13 Oktober 2023



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> -----	i
<b>DAFTAR ISI</b> -----	iii
<b>BAB 1 KONSEP DASAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK</b> -----	1
1.1 Pemahaman Akuntansi Sektor Publik -----	1
1.2 Akuntabilitas pada Akuntansi Sektor Publik -----	2
1.3 Entitas Pelaporan Akuntansi Sektor Publik -----	4
1.4 Periode Akuntansi Sektor Publik -----	5
1.5 Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Sektor Publik -----	7
1.6 Asas Ekonomi dan Asas Kas pada Akuntansi Sektor Publik	9
1.7 Konsistensi dan Kontinuitas pada Akuntansi Sektor Publik -----	10
1.8 Pengungkapan Informasi Akuntansi Sektor Publik -----	12
<b>BAB 2 SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK</b> -----	15
2.1 Awal Mula-----	15
2.2 Perubahan Revolusioner (Revolutionary Changes)-----	18
2.3 Munculnya Standar Akuntansi -----	20

2.4 Pertumbuhan Global-----	22
2.5 Perkembangan Teknologi -----	23
2.6 Pada Masa Sekarang -----	24
<b>BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK-----</b>	<b>27</b>
3.1 Pendahuluan -----	27
3.2 Definisi dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik-----	28
3.3 Tujuan dan Peranan Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik-----	29
3.4 Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi Sektor Publik -----	31
3.5 Karakteristik Informasi Keuangan Sektor Publik -----	32
3.6 Elemen Laporan Keuangan Sektor Publik -----	33
<b>BAB 4 AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK -----</b>	<b>39</b>
4.1 Pendahuluan -----	39
4.2 Pengertian Akuntansi Manajemen Sektor Publik -----	40
4.3 Empat Pondasi Akuntansi Manajemen Sektor Publik -----	44
4.4 Proses Akuntansi Manajemen Di Sektor Publik -----	45
<b>BAB 5 PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK-----</b>	<b>49</b>
5.1 Pendahuluan -----	49
5.2 Konsep Dasar Penganggaran Sektor Publik -----	50
5.3 Proses Penganggaran-----	56
<b>BAB 6 ANALISIS INVESTASI SEKTOR PUBLIK-----</b>	<b>59</b>
6.1 Pendahuluan -----	59
6.2 Definisi Investasi Sektor Publik -----	61
6.3 Perbedaan Investasi Sektor Publik dan Investasi Swasta--	62
6.4 Metodologi Analisis Investasi Sektor Publik -----	64
6.5 Tantangan dalam Analisis Investasi Sektor Publik-----	69
6.6 Kesimpulan-----	71

<b>BAB 7 PENENTUAN HARGA PELAYANAN PUBLIK</b> -----	75
7.1 Pendahuluan -----	75
7.2 Tujuan Penentuan Harga Pelayanan Publik -----	76
7.3 Prinsip-prinsip yang Mendasari Penentuan Harga-----	77
7.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan Harga Pelayanan Publik -----	78
7.5 Metode Penentuan Harga dalam Pelayanan Publik -----	79
7.6 Aspek Regulasi dalam Penentuan Harga Pelayanan Publik	81
7.7 Evaluasi dan Penyesuaian Harga dalam Pelayanan Publik	83
8.8 Studi Kasus: Penentuan Harga dalam Sektor Publik -----	85
<b>BAB 8 PENGUKURAN KINERJA</b> -----	89
8.1 Pendahuluan -----	89
8.2 Konsep Kinerja-----	90
8.3. Pengukuran Kinerja -----	91
8.4. Tujuan Pengukuran Kinerja-----	92
8.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja -----	95
<b>BAB 9 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH</b> -----	97
9.1 Pendahuluan -----	97
9. 2 Konsep Laporan Keuangan Pemerintahan -----	100
9. 3 Jenis Laporan Keuangan Pemerintahan -----	101
<b>BAB 10 AUDIT SEKTOR PUBLIK</b> -----	105
10.1 Pengenalan Audit Sektor Publik -----	105
10.2 Metodologi Audit Sektor Publik-----	107
10.3 Jenis-jenis Audit Sektor Publik -----	110
10.4 Praktik Audit Sektor Publik-----	112
<b>BAB 11 AKUNTANSI UNTUK PARTAI POLITIK</b> -----	119
11.1 Pemisahan Dana -----	119
11.2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum-----	122
11.3 Contoh Pencatatan Transaksi Keuangan -----	123

11.4 Pengawasan Internal-----	126
<b>BAB 12 AKUNTANSI UNTUK TEMPAT IBADAH-----</b>	<b>129</b>
12.1 Pendahuluan-----	129
12.2 Tempat ibadah sebagai organisasi -----	130
12.3 Akuntabilitas Tempat Ibadah -----	131
12.4 Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba-----	134
12.5 Anggaran Kegiatan Tempat Ibadah -----	134
12.6 Siklus akuntansi untuk tempat ibadah -----	135
<b>BAB 13 AKUNTANSI UNTUK BIDANG PENDIDIKAN -----</b>	<b>143</b>
13.1 Pendahuluan-----	143
13.2 Definisi Dan Konsep Dasar Akuntansi Pendidikan -----	144
13.3 Aspek Pengelolaan Keuangan dalam Pendidikan-----	151
13.4 Akuntansi Manajemen Dalam Pendidikan -----	165
13.4. Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Program Pendidikan Melalui Akuntansi-----	168
13.5 Tantangan Dan Kompleksitas -----	170
<b>BAB 14 AKUNTANSI UNTUK YAYASAN SOSIAL &amp; LSM-----</b>	<b>175</b>
14.1 Pendahuluan-----	175
14.2 Yayasan-----	177
14.3 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) -----	178
14.4 Akuntansi untuk Yayasan Sosial dan LSM-----	179
<b>BAB 15 AKUNTANSI UNTUK LEMBAGA KESEHATAN -----</b>	<b>187</b>
15.1. Pengenalan Akuntansi di Lembaga Kesehatan -----	187
15.2. Struktur Organisasi dalam Lembaga Kesehatan -----	188
15.3 Akuntansi Pendapatan dalam Lembaga Kesehatan -----	190
15.4 Pengeluaran dan Biaya Operasional -----	192
15.5 Standar Akuntansi Kesehatan -----	193
15.6 Tantangan dan Perubahan dalam Akuntansi Kesehatan	195

<b>BAB 16 PROBLEMATIKA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA</b> -----	199
16.1 Kompleksitas Regulasi-----	199
16.2 Ketidakpastian Pendanaan-----	201
16.3 Akuntabilitas dan Transparansi-----	201
16.4 Sumber Daya Manusia (Human Resources) -----	204
16.5 Teknologi dan Sistem Informasi -----	204
16.6 Ketidakpastian Ekonomi dan Krisis Keuangan-----	205
16.7 Standar Akuntansi Internasional -----	207
<b>BIODATA PENULIS</b> -----	<b>211</b>



# BAB 1

## KONSEP DASAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Oleh Ari Purwanti



### 1.1 Pemahaman Akuntansi Sektor Publik

**A**kuntansi Sektor Publik adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan tentang entitas yang beroperasi di sektor publik, seperti pemerintah, lembaga publik, dan organisasi nirlaba yang menerima dana publik. Konsep dasar Akuntansi Sektor Publik bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik serta memberikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan.

Penerapan Akuntansi Sektor Publik dibangun dengan konsep yang tidak berbeda dari Akuntansi secara umum, antara lain: Akuntabilitas, Entitas Pelaporan Periode Akuntansi, Pengakuan dan Pengukuran, Asas Ekonomi dan Asas Kas, Pengungkapan

Informasi, Kepentingan Publik, Tujuan Ganda, Konsistensi dan Kontinuitas, Pemisahan Antara Ekuitas Publik dan Ekuitas Pribadi. Konsep-konsep dasar ini membentuk dasar dari sistem Akuntansi Sektor Publik dan membantu dalam menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

## **1.2 Akuntabilitas pada Akuntansi Sektor Publik**

Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam akuntansi sektor publik. Entitas sektor publik harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat. Akuntabilitas melibatkan pelaporan transparan dan akurat mengenai pengeluaran, pendapatan, dan aset yang dimiliki oleh entitas tersebut. Hal ini melibatkan tanggung jawab entitas sektor publik untuk melaporkan informasi keuangan dan kinerja secara transparan kepada pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, lembaga donor, dan lainnya.

Transparansi ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana dana publik digunakan dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan atau tindakan yang tidak etis. Akuntabilitas mendorong entitas sektor publik untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan dana publik. Ini berarti bahwa semua transaksi keuangan dan informasi yang berkaitan harus dicatat dan dilaporkan dengan jelas dan akurat.

Dengan menjalankan akuntabilitas, entitas harus menyajikan laporan keuangan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang pendapatan, pengeluaran, dan posisi keuangan. Entitas sektor publik memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik yang mereka kelola. Sehingga, memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk

menilai apakah dana publik dikelola secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas dalam akuntansi sektor publik juga berfokus pada pencapaian tujuan sosial dan program-program yang dijalankan oleh entitas tersebut. Entitas sektor publik harus melaporkan kinerja mereka dalam mencapai tujuan-tujuan ini. Hal ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas program, mengidentifikasi keberhasilan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Peran kunci yang dimainkan dalam Akuntabilitas adalah membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap entitas sektor publik. Dengan memberikan informasi yang jujur dan terbuka, entitas dapat membuktikan bahwa mereka beroperasi dengan integritas dan transparansi. Kepercayaan masyarakat ini penting dalam mempertahankan dukungan publik dan dukungan finansial bagi entitas sektor publik.

Konsep akuntabilitas juga berkontribusi pada pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dana publik. Dengan menjalankan praktik akuntansi yang baik, entitas sektor publik dapat memantau dan mengendalikan pengeluaran mereka, mengurangi risiko penyalahgunaan dana, serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Selain itu, akuntabilitas mendorong siklus umpan balik dan perbaikan terus-menerus. Melalui evaluasi kinerja yang transparan, entitas sektor publik dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan melakukan tindakan korektif untuk mencapai tujuan yang lebih baik di masa mendatang. Secara keseluruhan, akuntabilitas dalam akuntansi sektor publik memastikan bahwa entitas tersebut bertanggung jawab secara etis dan efektif dalam mengelola dana publik serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **1.3 Entitas Pelaporan Akuntansi Sektor Publik**

Konsep ini menetapkan bahwa entitas sektor publik memiliki identitas terpisah dari individu atau entitas lainnya. Entitas memiliki catatan keuangan yang terpisah dari pihak-pihak yang terkait dengannya.

Konsep entitas pelaporan adalah salah satu prinsip dasar dalam akuntansi sektor publik yang menetapkan bahwa entitas pemerintah atau entitas sektor publik memiliki identitas terpisah dan unik dari individu atau entitas lainnya. Konsep ini memiliki peran penting dalam menyediakan dasar untuk mengumpulkan, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan yang terkait dengan operasi dan transaksi entitas tersebut.

Peran penting konsep entitas pelaporan dalam akuntansi sektor publik diantaranya adalah berkaitan dengan pemisahan identitas. Konsep entitas pelaporan memastikan bahwa keuangan entitas sektor publik dipisahkan dari keuangan individu atau entitas lainnya. Kondisi ini berarti bahwa entitas tersebut memiliki catatan akuntansi yang terpisah dan independen yang mencerminkan aktivitas keuangan dan transaksinya.

Melalui pelaporan keuangan yang Terpisah, mendorong entitas sektor publik untuk menyajikan laporan keuangan yang terpisah dari pemilik atau pihak lain yang terkait. Laporan keuangan ini mencakup informasi tentang aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran yang hanya berkaitan dengan entitas sektor publik itu sendiri. Konsep entitas pelaporan mendukung konsistensi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Dengan memisahkan entitas sektor publik dari entitas lain, prinsip-prinsip akuntansi dan metode pengukuran yang konsisten dapat diterapkan tanpa campur tangan atau pengaruh eksternal. Sehingga, prinsip entitas pelaporan membantu memastikan bahwa penilaian keuangan entitas

sektor publik didasarkan pada keadaan finansial dan transaksi yang sebenarnya, bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak relevan. Kondisi ini berujung pada adanya pemisahan tanggung jawab dan akuntabilitas antara entitas sektor publik dan individu atau entitas lainnya. Entitas harus bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik dan pelaporan keuangannya secara terpisah.

Dengan memiliki entitas pelaporan yang terpisah, entitas sektor publik dapat dengan lebih baik menganalisis kinerja keuangan mereka dan mengukur pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan serta memungkinkan transparansi dalam pelaporan keuangan sektor publik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan sepenuhnya aktivitas dan posisi finansial entitas tersebut, yang membantu dalam menjaga akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara keseluruhan, konsep entitas pelaporan dalam akuntansi sektor publik berfungsi untuk memastikan bahwa entitas tersebut diperlakukan sebagai entitas yang terpisah dan independen, yang memiliki tanggung jawab sendiri terhadap pengelolaan keuangan dan pelaporan informasi yang akurat dan relevan.

## **1.4 Periode Akuntansi Sektor Publik**

Siklus akuntansi dalam sektor publik biasanya mengikuti periode anggaran pemerintah, yang umumnya adalah satu tahun. Selama periode ini, transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan. Siklus akuntansi dalam sektor publik mirip dengan siklus akuntansi dalam sektor swasta, tetapi ada beberapa perbedaan yang mencerminkan karakteristik unik entitas sektor publik, seperti pemerintah, lembaga publik, dan organisasi nirlaba.

Siklus akuntansi dalam sektor publik melibatkan langkah-langkah penting untuk mengumpulkan, mengukur, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan. Langkah pertama dalam siklus akuntansi sektor publik adalah perencanaan dan penganggaran. Entitas sektor publik merencanakan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan selama periode anggaran tertentu. Anggaran disusun untuk mengalokasikan dana untuk berbagai kegiatan dan proyek.

Setiap transaksi keuangan yang terjadi selama periode anggaran dicatat dalam jurnal atau sistem pencatatan lainnya. Ini mencakup transaksi pendapatan, pengeluaran, investasi, dan lainnya. Transaksi harus dicatat dengan akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Setelah transaksi dicatat, data tersebut diolah untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat. Ini melibatkan mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya, melakukan kalkulasi, dan mempersiapkan data untuk langkah selanjutnya.

Pada akhir periode anggaran, penyesuaian dilakukan untuk mencerminkan transaksi yang belum dicatat atau perlu disesuaikan. Ini termasuk penyesuaian untuk depresiasi aset, pendapatan yang masih harus diterima, dan lain-lain. Setelah penyesuaian dilakukan, buku-buku akuntansi ditutup untuk periode anggaran yang berakhir. Aktivitas ini melibatkan mentransfer saldo akun pendapatan dan biaya ke akun ekuitas, serta menyiapkan buku-buku untuk periode anggaran berikutnya. Setelah buku-buku ditutup, entitas sektor publik menyusun laporan keuangan. Laporan ini mencakup laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas keuangan (laporan laba rugi), dan laporan arus kas. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja finansial dan posisi keuangan entitas tersebut. Kemudian, banyak entitas sektor publik tunduk pada audit eksternal oleh pihak-pihak independen untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan laporan keuangan. Hal ini membantu memastikan bahwa

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan dapat dipercaya.

Setelah laporan keuangan disiapkan, entitas sektor publik melakukan evaluasi kinerja untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan telah tercapai. Evaluasi ini melibatkan membandingkan kinerja aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan di masa mendatang. Siklus akuntansi berlanjut dengan pengembangan anggaran dan perencanaan untuk periode anggaran berikutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan perubahan kebijakan atau kebutuhan. Siklus akuntansi dalam sektor publik adalah proses yang terus berulang setiap periode anggaran dan membantu entitas sektor publik untuk mengelola dana publik dengan efisien, transparan, dan akurat.

## **1.5 Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Sektor Publik**

Transaksi keuangan diakui dan diukur berdasarkan prinsip akuntansi yang relevan. Pendapatan diakui ketika terdapat bukti yang cukup mengenai penerimaan, sementara beban diakui ketika ada kewajiban yang timbul.

Pengakuan dan pengukuran adalah dua konsep yang sangat penting dalam akuntansi sektor publik. Pengakuan mengacu pada proses mengidentifikasi dan mencatat transaksi atau kejadian dalam catatan akuntansi, sementara pengukuran melibatkan menentukan nilai moneter atau nilai ekonomi dari transaksi atau kejadian tersebut. Proses ini membantu mengukur dampak keuangan dari aktivitas entitas sektor publik dan mencatatnya dalam laporan keuangan.

### **1.5.1. Pengakuan**

Pendapatan diakui ketika ada bukti yang cukup bahwa dana telah diterima atau akan diterima. Contohnya, penerimaan pajak atau penerimaan dari layanan yang diberikan.

Beban diakui ketika terdapat kewajiban yang dapat diukur dengan andal dan kemungkinan besar akan menghasilkan keluaran dana atau sumber daya ekonomi. Ini mencakup biaya operasional dan biaya lain yang terkait dengan aktivitas entitas.

Aset diakui ketika entitas memiliki kendali atas manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh aset tersebut dan ketika nilai ekonomi dari aset tersebut dapat diukur dengan andal. Ini meliputi aset seperti uang tunai, piutang, dan properti.

Kewajiban: Kewajiban diakui ketika entitas memiliki kewajiban hukum atau kontraktual untuk mentransfer manfaat ekonomi masa depan sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu.

### **1.5.2. Pengukuran**

*Historical Cost.* Pengukuran berdasarkan biaya aset atau kewajiban pada saat diperoleh atau diakui. Metode pengukuran ini yang umum digunakan untuk aset seperti properti dan peralatan.

Nilai Wajar (*Fair Value*). Pengukuran berdasarkan harga yang akan diperoleh jika aset dijual atau kewajiban dilunasi pada saat pengukuran. Pengukuran ini digunakan untuk beberapa jenis investasi dan instrumen keuangan.

Nilai Kini (*Present Value*). Pengukuran aset atau kewajiban berdasarkan nilai saat ini dari aliran kas yang diharapkan di masa depan. Pengukuran ini digunakan dalam mengukur beberapa kewajiban jangka panjang atau dalam konteks program pensiun.

Biaya Amortisasi (*Amortized Cost*). Pengukuran aset atau kewajiban berdasarkan biaya awal dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau amortisasi. Pengukuran ini sering digunakan dalam mengukur investasi seperti obligasi.

Pengakuan dan pengukuran dalam akuntansi sektor publik mengikuti prinsip-prinsip yang serupa dengan akuntansi sektor swasta, tetapi ada penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan tujuan sosial dalam pengambilan keputusan keuangan. Entitas sektor publik harus mempertimbangkan dengan hati-hati penerapan prinsip pengakuan dan pengukuran yang sesuai untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan akurat dan memberikan gambaran yang tepat tentang kinerja dan posisi keuangan mereka.

## **1.6 Asas Ekonomi dan Asas Kas pada Akuntansi Sektor Publik**

Asas ekonomi dan asas kas adalah dua prinsip akuntansi yang memiliki peran penting dalam akuntansi sektor publik. Kedua prinsip ini memengaruhi cara dana publik dikelola, dicatat, dan dilaporkan dalam konteks entitas pemerintah atau organisasi sektor publik.

Asas ekonomi menekankan pada pengukuran transaksi dan kejadian sektor publik berdasarkan nilai ekonomi sebenarnya yang terjadi, bukan sekadar mengikuti formalitas atau teknis akuntansi. Artinya, transaksi dan kejadian harus dicatat dan dilaporkan dengan mempertimbangkan efek ekonomi yang sebenarnya, bahkan jika itu melibatkan pengukuran yang kompleks atau berbeda dengan pengukuran berdasarkan asas kas. Misalnya, jika sebuah entitas sektor publik menerima pendanaan dari pihak ketiga dalam bentuk pinjaman, asas ekonomi akan mengharuskan entitas tersebut untuk mengakui pinjaman ini sebagai kewajiban meskipun tidak ada transaksi kas yang terlibat pada saat penerimaan dana. Hal ini memastikan bahwa posisi keuangan sektor publik mencerminkan kewajiban yang sebenarnya yang dimilikinya.

Asas kas mengukur transaksi berdasarkan aliran kas yang terjadi. Ini berarti bahwa pendapatan diakui ketika uang tunai

diterima, dan beban diakui ketika uang tunai dibayarkan. Asas kas sederhana dan mudah dipahami, yang dapat menjadi penting dalam lingkungan sektor publik yang sering memiliki sumber daya terbatas untuk administrasi akuntansi yang kompleks. Entitas sektor publik sering menggunakan asas kas dalam pelaporan transaksi operasional sehari-hari, seperti menerima pendapatan pajak dari warga atau membayar gaji pegawai. Kondisi ini memberikan gambaran langsung tentang aliran kas masuk dan keluar entitas tersebut.

Perlu dicatat bahwa dalam prakteknya, banyak entitas sektor publik menggunakan campuran antara asas ekonomi dan asas kas. Mereka mungkin menerapkan asas kas untuk transaksi rutin sehari-hari, tetapi juga mengikuti asas ekonomi dalam konteks transaksi atau kejadian khusus yang memerlukan pengukuran nilai ekonomi yang lebih tepat. Pentingnya kedua prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas sektor publik mencerminkan dengan benar aktivitas dan posisi keuangan sektor tersebut. Penggunaan yang tepat dari asas ekonomi dan asas kas juga membantu para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan donor, dalam memahami bagaimana dana publik dikelola dan digunakan oleh entitas sektor public.

## **1.7 Konsistensi dan Kontinuitas pada Akuntansi Sektor Publik**

Konsistensi dan kontinuitas adalah dua prinsip dasar yang memiliki peran kunci dalam akuntansi sektor publik. Kedua prinsip ini membantu dalam menjaga stabilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan entitas sektor publik.

Konsistensi menekankan pentingnya menjaga metode akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun. Ini berarti bahwa entitas sektor publik harus menggunakan prinsip akuntansi

yang sama untuk jenis transaksi dan kejadian yang sama dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi berikutnya. Konsistensi memungkinkan pemangku kepentingan untuk membandingkan informasi keuangan dari tahun ke tahun dengan keyakinan bahwa perubahan dalam kinerja sebenarnya mencerminkan perubahan dalam aktivitas, bukan perubahan dalam kebijakan akuntansi. Misalnya, jika sebuah pemerintah daerah memilih metode pengukuran aset tertentu pada tahun tertentu, prinsip konsistensi akan mengharuskan mereka untuk tetap menggunakan metode itu dalam tahun-tahun berikutnya, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk mengubahnya.

Kontinuitas menekankan bahwa entitas sektor publik harus mengasumsikan bahwa mereka akan beroperasi secara terus-menerus dalam waktu yang dapat diprediksi. Ini berarti bahwa dalam menyusun laporan keuangan, entitas harus mengasumsikan bahwa kegiatan mereka akan terus berlanjut dalam waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan kewajiban yang ada dan mengubah aset menjadi kas. Prinsip ini memberikan kerangka waktu yang relevan untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kelangsungan operasional entitas sektor publik. Prinsip kontinuitas akan berarti bahwa dalam laporan keuangan entitas sektor publik, aset dan kewajiban jangka panjang harus diukur dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan beroperasi selama periode yang dianggap cukup lama.

Peran konsistensi dan kontinuitas dalam akuntansi sektor publik adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan adalah stabil, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Ini membantu para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pendonor, untuk memahami perubahan dalam kinerja dan posisi keuangan sektor publik. Terlebih lagi, kedua prinsip ini membantu dalam memelihara transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sektor publik, yang merupakan hal

yang sangat penting dalam pengelolaan dana publik dengan efisien dan efektif.

## **1.8 Pengungkapan Informasi Akuntansi Sektor Publik**

Pengungkapan Informasi (*Disclosure Principle*) memiliki peran yang sangat penting dalam akuntansi sektor publik. Prinsip ini menekankan kewajiban entitas sektor publik untuk memberikan informasi yang relevan, akurat, dan cukup kepada pemangku kepentingan.

Pengungkapan informasi mendukung transparansi dalam pelaporan keuangan sektor publik. Entitas sektor publik harus secara jujur dan terbuka menyajikan informasi tentang transaksi keuangan, operasi, dan kinerjanya. Sehingga, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dengan baik bagaimana dana publik digunakan dan dikelola. Pengungkapan informasi memungkinkan entitas sektor publik untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dengan menyediakan informasi yang lengkap dan akurat, entitas tersebut dapat menunjukkan bagaimana mereka telah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan dana publik.

Pengungkapan informasi membantu para pemangku kepentingan memahami kebijakan dan tujuan sektor publik. Informasi ini termasuk detail tentang program-program yang dijalankan oleh entitas tersebut, anggaran yang telah disusun, serta indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan. Dengan demikian, pemangku kepentingan dapat menilai kinerja entitas sektor publik dengan informasi yang tepat tentang pendapatan, pengeluaran, dan pencapaian tujuan, masyarakat dan pemerintah dan dapat mengevaluasi apakah entitas tersebut telah mencapai hasil yang diharapkan.

Informasi yang diungkapkan juga berperan dalam membantu pemangku kepentingan, termasuk pengambil keputusan pemerintah, dalam membuat keputusan yang tepat. Informasi keuangan yang lengkap dan relevan dapat membantu dalam merencanakan kebijakan, alokasi anggaran, dan penyesuaian strategi. Selain itu, pengungkapan informasi juga memainkan peran penting dalam proses pertanggungjawaban dan pengawasan. Informasi yang tepat dan terperinci dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan dana publik atau ketidakpatuhan dengan regulasi. Sehingga, pengungkapan informasi yang konsisten dan akurat membantu membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap entitas sektor publik. Kepercayaan ini penting dalam mempertahankan dukungan publik dan dukungan finansial untuk program-program dan proyek-proyek sektor publik.

Dengan demikian, prinsip pengungkapan informasi adalah fondasi penting dalam menjalankan akuntansi sektor publik yang etis, transparan, dan akuntabel. Hal ini memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh entitas sektor publik dapat digunakan dengan baik oleh semua pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat, memahami kinerja, dan memastikan penggunaan dana publik yang efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamilah and Shahimi, Shahida. 2014. "Challenges in Implementing Accrual Accounting in the Public Sector: A Case Study of Malaysia". *International Journal of Public Administration and Management Research*. Australian International Academic Centre
- Brusca, Isabel; Caperchione, Eugenio; and Cafferata, Carlo. 2015. *"Public Sector Accounting and Accountability in the European Union"*. Routledge
- Granof, Michael H.; Khumawala, Saleha B.; and Calabrese, Thad D. 2021. *"Government and Not-for-Profit Accounting: Concepts and Practices"*. Wiley
- Hartadi, Bambang; Meiranto; and Meutia, Inten. 2017. "The Challenges of Accrual Accounting Implementation in the Indonesian Public Sector: A Conceptual Framework". *Journal of Applied Accounting Research*. Emerald Publishing Limited
- Ohue, Isaac. 2016. "The Role of Public Sector Accounting and Reporting in Promoting Efficient Delivery of Public Services" *International Journal of Economics, Commerce, and Management*. Center for Enhancing Knowledge
- Reck, Jacqueline L.; Lowensohn, Suzanne L.; and Wilson, Earl R. 2020. *"Accounting for Governmental and Nonprofit Entities"*. McGraw-Hill Education
- Sunder, Shyam and Nehru, Vikram. 2014. "Public Sector Accounting and Accountability in India: An Overview" *International Journal of Business and Management*. Canadian Center of Science and Education
- Verdingovas, Vicentas P. 2015. *"Public Sector Accounting and Auditing in Europe: The Challenge of Harmonization"*. Springer

# BAB 2

## SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Oleh Wildoms Sahusilawane, SE., M.Si



### 2.1 Awal Mula

**S**ejarah akuntansi sektor publik mencakup perkembangan dan evolusi praktik akuntansi dalam konteks pemerintahan dan organisasi nirbala. Pada dasarnya, akuntansi sektor publik berfokus pada pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan entitas publik seperti pemerintah dan lembaga-lembaga amal. Dalam sejarahnya dimulai dari awal mula terjadinya akuntansi sektor publik pada masa pemerintahan kuno hingga pada abad pertengahan.

#### 2.1.1 Masa Pemerintahan Kuno

Di masa pemerintahan kuno, prinsip-prinsip akuntansi sektor publik mungkin tidak diatur dengan cara yang mirip dengan sistem modern pada saat ini. Namun, terdapat praktik

akuntansi yang terlihat dalam pemerintahan kuno, terutama dalam konteks peradaban Mesir, Romawi, dan Yunani.

### **Mesir Kuno**

1. Pemerintah Mesir Kuno dikenal dengan sistem administratif yang sangat terorganisir. Mereka memiliki sistem pencatatan untuk mengelola sumber daya seperti tanah, hasil panen, dan pajak.
2. Buku-catatan digunakan untuk mencatat berbagai transaksi dan kegiatan ekonomi. Pencatatan ini mencakup informasi tentang pengumpulan pajak, distribusi sumber daya, dan proyek-proyek konstruksi.

### **Romawi**

1. Romawi kuno memiliki sistem akuntansi yang canggih untuk mengelola keuangan negara dan memastikan pemungutan pajak yang efektif.
2. Mereka menggunakan praetor peregrinus (pejabat hukum) untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan kontrak dan transaksi ekonomi.
3. Catatan-catatan pemerintah Romawi mencakup anggaran, pengeluaran publik, dan pendapatan negara.

### **Yunani Kuno**

1. Prinsip-prinsip demokrasi di Athena, Yunani Kuno, menciptakan kebutuhan untuk transparansi keuangan pemerintah. Pemerintahan demokratis ini membutuhkan laporan keuangan.
2. Atheis Aristoteles, dalam karyanya "Politika," menyebutkan pentingnya pencatatan keuangan publik dan perlunya tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara (Brown, 1968).

#### **2.1.2 Masa Abad Pertengahan**

Pada Abad Pertengahan, praktik akuntansi sektor publik mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang

di Eropa. Sistem feodal mendominasi struktur pemerintahan, dengan tanah sebagai aset utama yang dikelola oleh keluarga bangsawan. Administrasi feodal mengandalkan pencatatan tanah dan pajak sebagai elemen kunci dalam menjalankan pemerintahan, di mana penerimaan pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti pertahanan dan infrastruktur (Lyon & Verhulst, 1967).

Selama periode ini, ekonomi masih didasarkan pada sistem barter, tetapi penggunaan mata uang koin mulai menjadi bagian integral dari transaksi ekonomi. Administrasi keuangan, terutama di tingkat lokal, mencatat pengeluaran dan penerimaan dalam bentuk mata uang koin, menciptakan bentuk awal dari pencatatan keuangan.

Sistem hukum dan keadilan juga terkait erat dengan administrasi keuangan. Penguasa feodal tidak hanya bertugas sebagai administrator keuangan tetapi juga sebagai penyelenggara keadilan. Hak pribadi dan kepemilikan tanah berpengaruh besar terhadap kewajiban pajak, menciptakan keterkaitan antara aspek-aspek sosial dan ekonomi.

Pengumpulan dana untuk perang Salib menciptakan tekanan tambahan pada sumber daya keuangan pemerintahan. Pemerintah harus mengatur sistem pajak dan dana tambahan untuk mendukung kampanye militer ini. Meskipun tidak ada sistem akuntansi formal pada masa itu, catatan-catatan tertentu dan pencatatan ekonomi dilakukan untuk mendukung administrasi pemerintahan. Pada akhirnya, perkembangan ini menjadi fondasi untuk evolusi sistem akuntansi sektor publik menuju bentuk yang lebih terstruktur dan terorganisir. Wawasan ini diperoleh melalui penelitian dalam buku sejarah umum, studi ekonomi, dan literatur sejarah Abad Pertengahan.

## **2.2 Perubahan Revolusioner (Revolutionary Changes)**

Perubahan revolusioner merujuk pada pergeseran signifikan dan transformasional dalam berbagai aspek masyarakat, politik, ekonomi, atau teknologi. Perubahan ini seiring menandai keberangkatan dari praktik-tradisional dan membuka jalan untuk cara berpikir dan mengorganisir yang baru.

### **2.2.1 Revolusi Industri**

Revolusi industri, yang dimulai pada pertengahan abad ke-18 di Inggris, menandai pergeseran mendasar dalam cara produksi, teknologi, dan struktur masyarakat. Sebelumnya, produksi didominasi oleh pekerjaan tangan di rumah atau pertanian. Namun, dengan munculnya mesin uap, pabrik-pabrik besar muncul, menggantikan metode produksi manual. Teknologi kunci seperti mesin uap dan mesin-mesin tekstil mekanis menjadi pendorong utama perubahan ini, meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan.

Urbanisasi besar-besaran terjadi karena pabrik-pabrik membutuhkan tenaga kerja yang lebih besar, mengakibatkan pemindahan penduduk dari pedesaan ke kota-kota industri. Pembangunan infrastruktur seperti jaringan rel kereta api dan kanal mempercepat transportasi barang dan bahan mentah. Dampak sosial dan ekonomi melibatkan pembentukan kelas pekerja industri yang besar, peningkatan standar hidup, tetapi juga munculnya kondisi kerja yang sulit. Industri tekstil menjadi salah satu yang pertama mengalami perubahan besar, dengan mesin pemintal dan mesin tenun mekanis yang mengubah lanskap produksi tekstil. Revolusi Industri juga menyebar ke berbagai negara Eropa dan Amerika Utara, membentuk dasar bagi pertumbuhan ekonomi global. Dampak jangka panjangnya melibatkan transformasi mendalam dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi, membentuk landasan bagi masyarakat industri modern saat ini (Allen, 2017).

### **2.2.2 Pada Abad ke-19**

Pada abad ke-19, perubahan sosial, politik, dan ekonomi memberikan dampak signifikan pada perkembangan akuntansi sektor publik di berbagai negara. Seiring dengan pertumbuhan pemerintah modern, terjadi peningkatan kebutuhan untuk praktik akuntansi yang lebih terstruktur dan transparan. Pencatatan pajak dan penerimaan publik menjadi semakin penting sebagai respons terhadap tuntutan keuangan pemerintah yang berkembang. Dalam mengelola sejumlah besar keuangan publik untuk menyediakan layanan dan mendukung proyek-proyek infrastruktur, pemerintah mulai mencatat secara lebih rinci pendapatan dan pengeluaran publik.

Meskipun belum ada standar formal, prinsip-prinsip awal tentang akuntansi sektor publik mulai muncul. Pelaporan keuangan pemerintah menjadi lebih terstruktur, menciptakan dokumen laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Reformasi pemerintah di beberapa negara dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, mencakup pembaharuan dalam sistem akuntansi pemerintah.

Pada tingkat lokal, terutama di wilayah dengan sistem pemerintahan desa atau kota, praktik akuntansi sektor publik mulai berkembang. Pemikiran ekonomi dan politik abad ke-19, termasuk teori-teori tentang peran pemerintah, turut membentuk praktik akuntansi sektor publik. Prinsip-prinsip seperti efisiensi, keadilan, dan tanggung jawab menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan praktik akuntansi.

Meskipun belum mencapai tingkat kompleksitas seperti pada abad-abad berikutnya, abad ke-19 memberikan fondasi penting bagi evolusi lebih lanjut dalam akuntansi sektor publik. Beberapa praktik dan pemikiran yang muncul pada periode ini

tetap relevan dalam pengembangan selanjutnya (Brusca et al., 2016).

## **2.3 Munculnya Standar Akuntansi**

Munculnya standar akuntansi adalah sebuah perjalanan panjang yang mencerminkan kebutuhan untuk konsistensi, transparansi, dan keandalan dalam pelaporan keuangan.

### **2.3.1 Awal Abad ke-20**

Awal abad ke-20 ditandai oleh peristiwa-peristiwa yang membawa transformasi mendalam dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Perang dunia I, konflik global yang meletus pada tahun 1914, menjadi episentrum perubahan besar. Perang ini membawa dampak serius terhadap perekonomian, masyarakat, dan politik di banyak negara, membentuk panggung bagi perubahan sosial dan politik yang mendalam. Meskipun perlahan pulih dari efek perang, dunia menyaksikan kelanjutan Revolusi Industri dan urbanisasi yang terus berkembang, dengan masyarakat bermigrasi dari pedesaan ke kota-kota industri.

Pada awal abad ke-20, akuntansi sektor publik masih menunjukkan ciri-ciri praktik tradisional dengan dominasi metode manual. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara manual menggunakan buku besar dan jurnal akuntansi, menuntut ketelitian dalam setiap langkahnya. Anggaran pada masa itu masih bersifat kasuistik, didasarkan pada alokasi sumber daya yang spesifik untuk kebutuhan-sektor tertentu. Pada periode ini, standar akuntansi sektor publik belum mencapai tingkat keseragaman global, sehingga setiap entitas pemerintah mungkin memiliki kebijakan dan prosedur akuntansi yang berbeda. Keterbatasan teknologi tercermin dalam penggunaan yang terbatas dari mesin hitung mekanikal. Sementara informasi keuangan yang dilaporkan mungkin tidak sekomprehensif dan seakurat yang diharapkan. Praktik

manajemen kas menjadi fokus utama, sementara kontrol internal dianggap penting untuk mencegah kecurangan. Pengaruh perang dan krisis ekonomi pada beberapa negara memerlukan tanggapan yang cepat terhadap kondisi yang sulit. Pada intinya, pada periode ini, akuntansi sektor publik masih dalam tahap perkembangan awal, mencerminkan kondisi dan teknologi pada zamannya (Freeman & Shoulders, 2000).

### **2.3.2 Governmental Accounting Standards Board (GASB)**

Governmental Accounting Standards Board (GASB) adalah lembaga yang memainkan peran penting dalam pengembangan standar akuntansi untuk entitas pemerintahan di Amerika Serikat. Dibentuk pada tahun 1984, GASB bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja akuntansi yang konsisten dan relevan untuk entitas pemerintahan, mencakup negara, pemerintah lokal, dan badan nirbala pemerintah. Situs resmi GASB menyediakan informasi terperinci tentang sejarah, struktur organisasi, dan standar akuntansi yang dikeluarkan. Standar akuntansi GASB, yang dikenal sebagai Statement of Governmental Accounting Standards (GASB Statements), mencakup berbagai aspek, mulai dari pelaporan keuangan hingga pemilihan metode akuntansi tertentu.

Penting untuk merujuk pada dokumen resmi GASB, seperti Exposure Drafts dan pronouncement statements, untuk memahami evolusi dan perubahan dalam standar akuntansi pemerintahan. GASB didirikan untuk mengembangkan panduan akuntansi sektor publik (Granof et al., 2016).

**Gambar 1.1** Governmental Accounting Standards Board (GASB)



## **2.4 Pertumbuhan Global**

Seiring globalisasi, organisasi internasional seperti International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) terlibat dalam mengembangkan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Pertumbuhan global mencakup serangkaian fenomena yang mencerminkan perkembangan dan perubahan dalam skala internasional. Aspek ekonomi menjadi pusat perhatian, di mana pertumbuhan ekonomi global melibatkan peningkatan output dan aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Faktor-faktor seperti investasi, perdagangan internasional, dan inovasi teknologi berperan sebagai pendorong utama dalam mencapai pertumbuhan tersebut. Globalisasi, yang menyertainya, mencirikan integrasi ekonomi, sosial, dan politik di seluruh dunia, membentuk suatu kerangka kerja yang terkait erat dengan pertumbuhan global.

Pertumbuhan populasi global juga menjadi komponen krusial, memengaruhi tata ruang sosial dan ekonomi. Meningkatnya urbanisasi, sebuah aspek signifikan dari pertumbuhan global, mencerminkan perpindahan besar-besaran penduduk dari pedesaan ke kota-kota besar untuk mencari peluang dan kehidupan yang lebih dinamis. Teknologi dan inovasi menjadi pendorong penting pertumbuhan global, mempercepat perubahan melalui revolusi teknologi informasi dan komunikasi (Friedman, 2007).

## **2.5 Perkembangan Teknologi**

Perkembangan teknologi dalam sejarah akuntansi sektor publik telah membawa perubahan signifikan dalam cara entitas pemerintahan mengelola dan melaporkan informasi keuangan (Granof et al., 2016).

### **2.5.1 Penggunaan Mesin Hitung Mekanikal (Awal Abad ke-20)**

Pada awal abad ke-20, mesin hitung mekanikal mulai digunakan untuk mempermudah perhitungan dan penyusunan laporan keuangan. Mesin ini, meskipun belum sepenuhnya membantu meningkatkan efisiensi proses akuntansi tetapi pada masa itu merupakan alat yang cukup penting.

### **2.5.2. Komputer dan Sistem Akuntansi Elektronik (1950-an dan 1960-an)**

Perkembangan komputer pada tahun 1950-an dan 1960-an membawa revolusi dalam akuntansi sektor publik. Penggunaan komputer memungkinkan penyimpanan data yang lebih efisien, pengolahan transaksi yang lebih cepat, dan menghasilkan laporan keuangan.

### **2.5.3. Era Sistem Informasi Akuntansi (1980-an dan 1990-an)**

Sistem Informasi Akuntansi (AIS) mulai muncul sebagai konsep terpusat untuk mengelola seluruh siklus akuntansi. Penggunaan basis data relasional memungkinkan entitas pemerintahan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan lebih efektif.

### **2.5.4. Pemanfaatan Teknologi Cloud dan E-Government (2010-an dan seterusnya)**

Pemanfaatan teknologi cloud dan konsep e-government semakin meluas. Entitas pemerintahan dapat menyimpan data

secara aman di cloud, memungkinkan akses data dari berbagai lokasi, dan meningkatkan kolaborasi antarunit.

## **2.6 Pada Masa Sekarang**

Dalam era kontemporer, akuntansi sektor publik mengalami transformasi signifikan yang dipandu oleh kemajuan teknologi dan tuntutan akan transparansi serta efisiensi. Teknologi digital, seperti sistem akuntansi terintegrasi, platform cloud, dan kecerdasan buatan, telah diadopsi oleh pemerintahan di seluruh dunia untuk memodernisasi praktik akuntansi dan meningkatkan pengelolaan keuangan. Konsep pelaporan keuangan terpadu telah menjadi fokus, menggabungkan informasi keuangan, kinerja, dan non-keuangan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang kondisi dan kinerja organisasi sektor publik. Standar akuntansi internasional, seperti IPSAS, semakin banyak diadopsi untuk meningkatkan konsistensi dan perbandingan antar entitas sektor publik. Manajemen risiko dan kepatuhan menjadi perhatian utama, dengan pemerintah menekankan perlunya memiliki sistem yang kuat untuk mengelola risiko dan mematuhi regulasi yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, R. C. (2017). *The Industrial Revolution: A Very Short Introduction*. Oxford University Press. [https://books.google.co.id/books?id=Naz\\_DQAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=Naz_DQAAQBAJ)
- Brown, R. (1968). *A History of Accounting and Accountants*. A. M. Kelley. [https://books.google.co.id/books?id=1gic2\\_37tjIC](https://books.google.co.id/books?id=1gic2_37tjIC)
- Brusca, I., Caperchione, E., Cohen, S., & Rossi, F. M. (2016). *Public Sector Accounting and Auditing in Europe: The Challenge of Harmonization*. Palgrave Macmillan UK. [https://books.google.co.id/books?id=-vK\\_CQAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=-vK_CQAAQBAJ)
- Freeman, R. J., & Shoulders, C. D. (2000). *Governmental and Nonprofit Accounting: Theory and Practice*. Prentice Hall. <https://books.google.co.id/books?id=-IWvWKQyivYC>
- Friedman, T. L. (2007). *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. Douglas and McIntyre (2013) Limited. <https://books.google.co.id/books?id=cFqJ0biC89YC>
- Granof, M. H., Khumawala, S. B., Calabrese, T. D., & Smith, D. L. (2016). *Government and Not-for-Profit Accounting: Concepts and Practices*. Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=xlggCwAAQBAJ>
- Lyon, B. D., & Verhulst, A. E. (1967). *Medieval Finance. A Comparison of Financial Institutions in Northwestern Europe* (Issue v. 143). De Tempel. <https://books.google.co.id/books?id=OwdZAAAAMAAJ>



# BAB 3

## KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Oleh Lia Dama Yanti



### 3.1 Pendahuluan

**K**erangka konseptual akuntansi sektor publik menjadi landasan teoritis mendasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dan entitas sektor publik lainnya. Kerangka konseptual ini menyediakan pedoman mengenai prinsip-prinsip, tujuan, dan karakteristik umum dari informasi keuangan sektor publik (Hasanah & Fauzi, 2017). Seiring dengan peran yang semakin vital dari pemerintah dalam kehidupan masyarakat, permintaan akan transparansi dan akuntabilitas di dalam mengelola keuangan publik semakin mendesak. Dalam konteks ini, kerangka konseptual akuntansi sektor publik memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan mencerminkan kinerja, posisi keuangan, dan tanggung jawab pemerintah secara akurat dan jelas (Yuesti et al., 2020).

Seiring dengan kompleksitas tugas-tugas dan kewajiban pemerintah, kebutuhan akan standar akuntansi yang jelas dan komprehensif menjadi suatu keharusan. Sebelum diperkenalkannya kerangka konseptual, terdapat keraguan dan inkonsistensi dalam metode pelaporan keuangan sektor publik (Erniati, 2019). Hal ini menyebabkan sulitnya membandingkan kinerja keuangan antar entitas sektor publik, serta kesulitan dalam mengukur dampak program dan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.

### **3.2 Definisi dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan dan non-keuangan yang terjadi di sektor publik. Tujuan utamanya adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik (Biduri, 2018).

#### **Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik**

- 1. Pemerintah dan Organisasi Sektor Publik**

Mencakup semua entitas yang beroperasi di sektor publik, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dan badan-badan publik seperti rumah sakit dan perguruan tinggi negeri.

- 2. Pencatatan Transaksi Keuangan**

Mencatat seluruh transaksi keuangan yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran dana publik, termasuk pendapatan pajak, sumber-sumber pendanaan lainnya, serta belanja untuk program dan proyek publik.

- 3. Pengukuran Kinerja**

Selain transaksi keuangan, akuntansi sektor publik juga mengukur kinerja entitas publik dalam mencapai tujuan-tujuan mereka. Hal ini termasuk mengukur efisiensi,

efektivitas, dan dampak dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

#### 4. Pengelolaan Aset Publik

Akuntansi sektor publik juga meliputi pencatatan dan pengelolaan aset publik seperti bangunan, jalan, infrastruktur, dan properti lainnya yang dimiliki oleh entitas sektor publik.

#### 5. Pengungkapan Informasi

Akuntansi sektor publik memastikan bahwa informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan disajikan dengan jelas dan transparan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum.

#### 6. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Sektor Publik

Mencakup kewajiban untuk mematuhi standar akuntansi yang berlaku dalam konteks sektor publik. Standar ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kualitas laporan keuangan.

#### 7. Pengawasan dan Audit

Akuntansi sektor publik melibatkan proses pengawasan dan audit untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan informasi keuangan yang disajikan.

### **3.3 Tujuan dan Peranan Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik menjadi sistem yang penting dalam mengelola dan melaporkan informasi keuangan pemerintahan dan lembaga sektor publik lainnya. Untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan akurat, relevan, dan bisa diandalkan, diperlukan sebuah kerangka konseptual yang menjadi landasan bagi penyusunan laporan keuangan. Dalam konteks ini, kerangka konseptual memiliki tujuan dan peranan penting yang tidak dapat diabaikan.

Tujuan kerangka dasar adalah acuan bagi:

1. Tim Penyusun Standar akuntansi keuangan sektor publik;
2. Penyusun laporan keuangan  
Memahami praktik akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik;
3. Auditor (BPK)  
Memberikan opini apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan
4. Para pemakai laporan keuangan sektor publik,  
Menafsirkan informasi yang disediakan pada laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik.

Kerangka dasar ini bukanlah standar akuntansi keuangan sektor publik. Komite Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik menggunakan Kerangka Dasar sebagai acuan dalam pengembangan dan peninjauan standar akuntansi keuangan sektor publik di masa depan (Hartoto et al., 2023).

Peranan Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik:

1. Membentuk Dasar Standar Akuntansi Keuangan  
Kerangka konseptual membentuk dasar bagi pembentukan standar akuntansi sektor publik. Standar-standar ini merujuk pada prinsip-prinsip dan konsep kerangka konseptual
2. Mengarahkan Penyajian Informasi yang Konsisten  
Kerangka konseptual membantu dalam mengarahkan penyajian informasi keuangan agar konsisten dari satu entitas ke entitas lainnya. Hal ini penting untuk memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga sektor publik.

3. Mengidentifikasi aspek-aspek penting dalam Pelaporan Keuangan  
Kerangka konseptual membantu mengidentifikasi aspek-aspek penting dalam laporan keuangan, termasuk informasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya.
4. Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas  
Dengan adanya kerangka konseptual, laporan keuangan sektor publik dapat disusun dengan tingkat transparansi yang tinggi. Hal ini memungkinkan pemakai laporan untuk memahami dengan jelas posisi keuangan dan kinerja organisasi.
5. Mengakomodasi Perubahan Lingkungan dan Praktik Bisnis  
Kerangka konseptual harus mampu mengakomodasi perubahan dalam lingkungan ekonomi, hukum, dan praktik bisnis. Ini penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan tetap relevan dan dapat diandalkan.

### **3.4 Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi Sektor Publik**

#### **3.4.1 Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)**

Salah satu prinsip utama dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah keterbukaan. Hal ini mengacu pada kewajiban untuk mengungkapkan informasi keuangan dengan cara yang jelas dan terperinci sehingga memungkinkan para pengguna untuk memahami dengan baik posisi keuangan dan kinerja pemerintah.

#### **3.4.2 Prinsip Konsistensi (*Consistency*)**

Prinsip konsistensi menekankan pentingnya penggunaan metode akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun. Sehingga, pengguna informasi keuangan dapat membandingkan kinerja keuangan antar periode.

### **3.4.2 Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Informasi keuangan sektor publik harus memungkinkan para pemangku kepentingan menilai kinerja pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

### **3.4.2 Prinsip Akurat (*Accuracy*)**

Ketepatan atau akurasi informasi keuangan adalah prinsip kunci dalam kerangka konseptual. Laporan keuangan harus mencerminkan transaksi dan kejadian secara tepat, tanpa bias, yang merujuk pada standar akuntansi yang berlaku (Komite Standar Akuntansi Publik, 2021).

## **3.5 Karakteristik Informasi Keuangan Sektor Publik**

### **3.5.1 Relevansi (*Relevance*)**

Agar informasi keuangan bermanfaat, informasi tersebut harus dianggap relevan; ini berarti bahwa laporan tersebut harus dapat berdampak pada keputusan ekonomi para pengguna. Informasi tersebut harus dapat membantu dalam analisis peristiwa masa lalu dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan, memahami situasi saat ini, atau membuat prediksi tentang masa depan.

### **3.5.2 Keandalan (*Reliability*)**

Kualitas informasi yang memenuhi persyaratan penggunaannya dikenal sebagai keandalan. Informasi harus dapat diverifikasi, tidak memihak, dan disajikan secara jujur agar dianggap dapat diandalkan dalam konteks kerangka konseptual.

### **3.5.3 Kesahihan (*Faithful Representation*)**

Kesahihan mengacu pada kecocokan antara informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan kejadian atau transaksi yang sesungguhnya (Hantono et al., 2021).

## **3.6 Elemen Laporan Keuangan Sektor Publik**

Laporan keuangan sektor publik adalah dokumen formal yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas sektor publik, seperti pemerintah, lembaga non-profit, atau badan usaha milik negara. Laporan ini merupakan instrumen kunci dalam menilai kesehatan keuangan dan akuntabilitas organisasi sektor publik terhadap para pemangku kepentingan. Di dalam memahami laporan keuangan sektor publik, perlu dipahami pula komponen utama penyusunnya. (Mardiasmo, 2018).

### **3.6.1 Ringkasan Eksekutif**

Ringkasan eksekutif adalah bagian awal dari laporan keuangan sektor publik yang mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja organisasi. Ini biasanya mencakup poin-poin utama dan tren yang relevan bagi pembaca untuk memahami laporan secara menyeluruh.

### **3.6.2 Ikhtisar Keuangan:**

Bagian ini memberikan ringkasan posisi keuangan organisasi pada periode tertentu, yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas bersih. Informasi ini memberikan gambaran tentang seberapa besar organisasi tersebut dan seberapa banyak keuangannya dikelola. Didalam (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005)dijelaskan bahwa:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Lebih lanjut, dapat dijelaskan untuk tiap-tiap elemen di atas:

#### 1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang nyata atau potensi jasa suatu aset dalam berkontribusi, secara langsung atau tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada entitas, yang bisa mengalir ke entitas dalam berbagai cara, diantaranya aset dapat:

- a) dimanfaatkan sendiri ataupun bersama aset lain dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat;
- b) dipertukarkan dengan aset lain;
- c) dimanfaatkan untuk menyelesaikan kewajiban;
- d) dibagikan kepada pemilik entitas (struktur yang ada di atasnya).

#### 2. Kewajiban

Kewajiban dapat dibebankan secara hukum berdasarkan kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan, misalnya dengan melampirkan jumlah utang pada jumlah barang atau jasa yang diterima. Kewajiban bisa ditimbulkan dari praktik pelayanan publik, kebiasaan, dan keinginan untuk menjaga hubungan bisnis yang baik atau berbuat secara adil.

Penyelesaian kewajiban bisa melalui bermacam cara, diantaranya, dengan:

- a) membayarkan kas;
- b) menyerahkan aset lain;

- c) memberikan jasa;
- d) mengganti kewajiban tersebut dengan kewajiban lain;
- e) mengkonversi kewajiban menjadi ekuitas; atau
- f) kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

### 3. Ekuitas

Ekuitas dapat disegmentasi dalam laporan posisi keuangan dan relevansi klasifikasi tersebut akan terjadi jika pos tersebut menunjukkan bahwa kemampuan entitas untuk menggunakan ekuitas tunduk pada pembatasan hukum atau pembatasan lainnya. (Bastian, 2006).

### 3.6.3 Laporan Pendapatan dan Beban:

Laporan pendapatan dan beban menyajikan detail tentang pendapatan yang diterima oleh organisasi dan beban yang dikeluarkan selama periode tertentu. Ini mencakup sumber pendapatan seperti pajak, sumbangan, dan pendapatan lainnya, serta beban seperti gaji, biaya operasional, dan beban lainnya.

#### 1. Pendapatan (*income*)

Arus kas masuk selama periode pelaporan dengan tujuan kenaikan aset/ekuitas neto ( adanya kenaikan kontribusi dari pemilik).

Pendapatan meliputi pendapatan (*revenues*), keuntungan (*gain*) dan keuntungan yang belum direalisasi, yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan (*marketable*) dan dari kenaikan jumlah aset jangka panjang.

#### 2. Beban (*expense*)

Selama periode pelaporan, penurunan manfaat ekonomi yang akan datang terlihat jelas dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset dan liabilitas atau kewajiban yang memperkecil distribusi ke pemilik.

Beban mencakup kerugian maupun biaya yang timbul dalam menjalankan kegiatan entitas yang umumnya antara lain: jasa publik umum, pertahanan, keteraturan dan keamanan publik. Kerugian dapat timbul, misalnya, adanya pelepasan aset tetap.

#### **3.6.4 Laporan Perubahan Ekuitas:**

Laporan ini memperlihatkan perubahan dalam ekuitas bersih organisasi dari periode ke periode. Ini termasuk tambahan modal, distribusi keuntungan atau kerugian, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi posisi keuangan organisasi.

#### **3.6.5 Laporan Arus Kas:**

Laporan arus kas mencatat aliran uang masuk dan keluar dari organisasi selama periode tertentu. Ini mencakup aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan, memberikan gambaran tentang sumber daya keuangan yang digunakan dan dihasilkan selama periode waktu tertentu.

#### **3.6.6 Catatan atas Laporan Keuangan:**

Catatan ini menjadi bagian yang penting karena memberikan penjelasan rinci mengenai metode akuntansi, estimasi, dan kebijakan lain yang digunakan ketika menyusun laporan keuangan, antara lain informasi penting seperti asumsi yang mendasari estimasi dan peristiwa yang terjadi setelah akhir periode pelaporan.

#### **3.6.7 Informasi Pendukung Lainnya:**

Terkadang, laporan keuangan sektor publik dapat mencakup informasi tambahan atau terpisah seperti informasi sektoral, program atau proyek khusus, atau informasi lain yang dianggap relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga.
- Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-1>
- Erniati. (2019). *Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara*.  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-sebagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html>
- Hantono, Inuzula, L., Husain, S. A., Widiastara, A., Dhany, U. R., Sululing, S., Novitasari, M., Hendra, J., Amerieska, S., Suryaningi, Amani, T., Ariyanto, S., Werastuti, D. N. S., & Muchlis, S. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (S. Bahri, Ed.). Penerbit Media Sains Indonesia.
- Hartoto, Tatmimah, I., Endraria, Muzayyanah, Sriyani, Djasuli, M., Rahmawati, I., Lestari, H. D., Dewi, M. S., Setyagustina, K., Nurdialy, M., Fitri, S. A., & Ardhiariska, O. (2023). *Akuntansi Sektor Publik* (E. Damayanti, Ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit In Media.
- Komite Standar Akuntansi Publik. (2021). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. [www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/](https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/)
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo, Ed.; Edisi terbaru). CV. Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2005).
- Yuesti, A., Dewi, N. L. P. S., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik* (N. W. Rustiarini, Ed.). CV. Noah Aletheia.



# BAB

# 15

## AKUNTANSI UNTUK LEMBAGA KESEHATAN

Oleh Edy Susanto, S.E., M.Ak., Ak., CA.,  
CPAI., CTA., CPA (Expert)., CSRS.,  
CSRA., CSP., ASEAN CPA., CertDA.



### 15.1. Pengenalan Akuntansi di Lembaga Kesehatan

**P**engenalan akuntansi di lembaga kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien, keuangan lembaga terkelola dengan baik, dan pelaporan keuangan yang akurat dapat diberikan kepada pemangku kepentingan (Louis C. Gapenski, 2018).

#### 15.1.1 Pengenalan

Akuntansi dalam lembaga kesehatan melibatkan pencatatan, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan yang terkait dengan operasi kesehatan. Ini termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban yang berkaitan dengan penyediaan layanan

kesehatan. Tujuan utama akuntansi dalam lembaga kesehatan adalah untuk memastikan bahwa keuangan lembaga dikelola dengan baik, sumber daya dialokasikan secara efisien, dan bahwa lembaga tersebut mematuhi peraturan keuangan yang berlaku.

### **15.1.2 Pentingnya Akuntansi dalam Lembaga Kesehatan**

1. **Pengambilan Keputusan:** Akuntansi memberikan data keuangan yang diperlukan bagi manajemen lembaga kesehatan untuk membuat keputusan strategis. Ini dapat mencakup alokasi anggaran, perencanaan investasi, dan evaluasi kinerja keuangan.
2. **Transparansi dan Pertanggungjawaban:** Melalui akuntansi yang tepat, lembaga kesehatan dapat memenuhi persyaratan pelaporan kepada berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, donor, atau pemegang saham. Hal ini meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana.
3. **Efisiensi Operasional:** Akuntansi membantu mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan. Misalnya, dengan menganalisis biaya pengeluaran, lembaga kesehatan dapat mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan.
4. **Pemantauan Kesehatan Keuangan:** Melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang berkala, lembaga kesehatan dapat memantau kesehatan keuangan mereka. Hal ini memungkinkan untuk menghindari masalah keuangan yang mungkin timbul dan mengambil tindakan korektif tepat waktu.

### **15.2. Struktur Organisasi dalam Lembaga Kesehatan**

Struktur organisasi dalam lembaga kesehatan adalah kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana lembaga tersebut

diorganisasi, hierarki manajemen, dan cara berbagai bagian atau departemen berinteraksi. Struktur organisasi ini memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan aktivitas kesehatan, mengelola sumber daya, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien (Dr .C .K. Gomathy et al., 2023). Berikut struktur organisasi dalam lembaga kesehatan, dengan dukungan dari sumber ilmiah yang relevan.

### **15.2.1 Jenis-Jenis Struktur Organisasi dalam Lembaga Kesehatan**

1. **Struktur Organisasi Fungsional:** Dalam struktur ini, lembaga kesehatan dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi utama, seperti pelayanan klinis, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Setiap departemen memiliki kepala atau manajer yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut.
2. **Struktur Organisasi Matriks:** Struktur ini melibatkan kombinasi antara struktur fungsional dan proyek. Sebagai contoh, seorang dokter atau perawat dapat menjadi bagian dari tim proyek tertentu sambil tetap tergabung dalam departemen klinis mereka.
3. **Struktur Organisasi Berdasarkan Lokasi Geografis:** Beberapa lembaga kesehatan yang besar memiliki banyak cabang atau fasilitas di berbagai lokasi geografis. Struktur ini mengorganisir berdasarkan lokasi, yang memungkinkan koordinasi operasional di seluruh wilayah.
4. **Struktur Organisasi Berbasis Pasien:** Dalam upaya meningkatkan perhatian terhadap pasien, beberapa lembaga kesehatan telah beralih ke struktur organisasi berbasis pasien. Ini berarti bahwa departemen atau unit dikelompokkan berdasarkan jenis perawatan yang

diberikan kepada pasien, seperti departemen bedah atau unit rawat jalan.

### 15.2.2 Peran Struktur Organisasi dalam Lembaga Kesehatan

1. **Koordinasi:** Struktur organisasi memastikan koordinasi yang baik antara berbagai departemen dan unit dalam lembaga kesehatan. Ini penting agar pelayanan kesehatan berjalan lancar dan efisien.
2. **Manajemen Sumber Daya:** Struktur organisasi membantu dalam manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan fisik. Hal ini membantu lembaga kesehatan untuk mengalokasikan sumber daya dengan bijak.
3. **Peningkatan Kualitas Pelayanan:** Dengan struktur yang baik, lembaga kesehatan dapat lebih mudah memonitor dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
4. **Pengambilan Keputusan:** Struktur organisasi membantu dalam pengambilan keputusan yang efisien dengan mendefinisikan peran dan tanggung jawab setiap tingkat dalam hierarki organisasi.

### 15.3 Akuntansi Pendapatan dalam Lembaga Kesehatan

Akuntansi pendapatan dalam lembaga kesehatan melibatkan proses pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian pendapatan yang diterima oleh lembaga tersebut dari berbagai sumber, seperti pasien, asuransi kesehatan, program pemerintah, dan sumber pendanaan lainnya. Hal ini memainkan peran penting dalam memastikan keuangan lembaga kesehatan terkelola dengan baik dan sumber daya yang diterima digunakan dengan efisien (David W. Young,

2022). Berikut adalah penjelasan rinci mengenai akuntansi pendapatan dalam lembaga kesehatan beserta sumber ilmiah yang relevan.

### **15.3.1 Proses Akuntansi Pendapatan dalam Lembaga Kesehatan**

1. **Pencatatan Pendapatan:** Pendapatan yang diterima dari berbagai sumber dicatat dengan cermat. Ini mencakup penerimaan dari pasien yang membayar tunai, asuransi kesehatan, dan dana pemerintah.
2. **Pengenalan Pendapatan:** Pendapatan biasanya diakui ketika layanan medis atau perawatan pasien disediakan. Konsep pengakuan pendapatan ini harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, seperti Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).
3. **Penentuan Nilai Pendapatan:** Nilai pendapatan harus ditentukan dengan benar. Ini mencakup menghitung biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien.
4. **Pelaporan Keuangan:** Pendapatan yang diakui dicatat dalam laporan keuangan lembaga kesehatan, seperti laporan laba rugi atau laporan arus kas. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk melihat seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh lembaga kesehatan.

### **15.3.2 Pentingnya Akuntansi Pendapatan dalam Lembaga Kesehatan**

1. **Transparansi Keuangan:** Akuntansi pendapatan yang baik memastikan bahwa lembaga kesehatan dapat memberikan laporan keuangan yang transparan kepada pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat umum.

2. **Keputusan Manajerial:** Data pendapatan yang akurat memungkinkan manajemen lembaga kesehatan untuk membuat keputusan yang lebih baik, termasuk alokasi anggaran dan perencanaan strategis.
3. **Pemantauan Efisiensi:** Dengan mengikuti pendapatan, lembaga kesehatan dapat memantau efisiensi operasional dan mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan.

## 15.4 Pengeluaran dan Biaya Operasional

Pengeluaran dan biaya operasional dalam lembaga kesehatan merujuk pada semua pengeluaran yang terkait dengan penyediaan layanan kesehatan dan operasional sehari-hari. Ini mencakup berbagai jenis biaya yang harus ditanggung oleh lembaga tersebut untuk menjalankan aktivitasnya (William N. Zelman et al., 2014).

### 15.4.1 Jenis-Jenis Pengeluaran dan Biaya Operasional dalam Lembaga Kesehatan

1. **Biaya Tenaga Kerja:** Ini mencakup gaji dan tunjangan karyawan, termasuk dokter, perawat, tenaga medis, dan staf administrasi. Biaya tenaga kerja adalah komponen biaya utama dalam lembaga kesehatan.
2. **Biaya Peralatan Medis:** Pembelian, pemeliharaan, dan penggantian peralatan medis seperti alat pemindaian, instrumen bedah, dan peralatan laboratorium.
3. **Biaya Obat-obatan dan Bahan Medis:** Biaya untuk membeli obat-obatan, perbekalan medis, dan bahan habis pakai yang digunakan dalam perawatan pasien.
4. **Biaya Fasilitas:** Biaya sewa atau pemeliharaan fasilitas fisik seperti gedung, kantor, dan laboratorium.

5. **Biaya Operasional Lainnya:** Ini mencakup biaya umum yang terkait dengan operasi sehari-hari, seperti utilitas, transportasi, komunikasi, dan keperluan kantor.
6. **Biaya Administrasi:** Biaya yang terkait dengan manajemen dan administrasi lembaga kesehatan, termasuk biaya perangkat lunak, biaya administrasi umum, dan biaya iklan.

#### **15.4.2 Peran Pengeluaran dan Biaya Operasional dalam Lembaga Kesehatan**

1. **Menjamin Kualitas Pelayanan:** Biaya operasional mendukung penyediaan pelayanan kesehatan berkualitas dengan memastikan tersedianya peralatan, sumber daya manusia, dan fasilitas yang diperlukan.
2. **Pemantauan Anggaran:** Pengeluaran dan biaya operasional harus dipantau secara cermat untuk memastikan bahwa lembaga kesehatan beroperasi sesuai dengan anggaran yang tersedia.
3. **Pengendalian Biaya:** Manajemen biaya yang efektif membantu lembaga kesehatan untuk mengendalikan pengeluaran yang berlebihan dan mencari cara untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan.
4. **Pemenuhan Regulasi:** Pengeluaran dan biaya operasional juga harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam sektor kesehatan, termasuk regulasi keuangan dan keselamatan pasien.

#### **15.5 Standar Akuntansi Kesehatan**

Standar akuntansi kesehatan adalah seperangkat pedoman dan prinsip akuntansi yang diterapkan secara khusus dalam industri kesehatan. Standar ini membantu lembaga kesehatan dalam pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan analisis

keuangan mereka. Penggunaan standar akuntansi yang tepat adalah kunci untuk memastikan bahwa informasi keuangan lembaga kesehatan akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Louis C. Gapenski, 2018).

### 15.5.1 Jenis-Jenis Standar Akuntansi Kesehatan

1. **Generally Accepted Accounting Principles (GAAP):** GAAP adalah seperangkat prinsip akuntansi yang diterima secara umum di Amerika Serikat. Lembaga kesehatan di Amerika Serikat diharuskan mengikuti GAAP dalam menyusun laporan keuangannya. GAAP menyediakan panduan tentang pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan liabilitas, serta pelaporan keuangan.
2. **Governmental Accounting Standards Board (GASB):** GASB adalah badan yang menetapkan standar akuntansi untuk entitas pemerintah, termasuk rumah sakit dan lembaga kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah. Standar GASB penting untuk pengukuran dan pelaporan keuangan yang tepat.
3. **Healthcare Financial Management Association (HFMA):** HFMA adalah organisasi profesional yang mengembangkan standar dan panduan akuntansi khusus untuk lembaga kesehatan. Mereka memberikan panduan praktis untuk masalah akuntansi kesehatan yang relevan.

### 15.5.2 Pentingnya Standar Akuntansi Kesehatan

1. **Kepatuhan Hukum:** Mengikuti standar akuntansi yang relevan adalah penting untuk memastikan bahwa lembaga kesehatan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam industri kesehatan.
2. **Transparansi dan Pertanggungjawaban:** Standar akuntansi membantu memastikan bahwa laporan

keuangan lembaga kesehatan adalah transparan dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat umum.

3. **Kualitas Keputusan:** Informasi keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi membantu manajemen lembaga kesehatan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan alokasi sumber daya dan perencanaan keuangan.

## 15.6 Tantangan dan Perubahan dalam Akuntansi Kesehatan

Akuntansi kesehatan adalah bidang yang terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Tantangan-tantangan ini mencerminkan kompleksitas sektor kesehatan yang melibatkan beragam entitas dan peraturan (Steven A. Finkler et al., 2020).

### 15.6.1 Tantangan dalam Akuntansi Kesehatan:

1. **Perubahan Regulasi:** Tantangan utama dalam akuntansi kesehatan adalah perubahan konstan dalam peraturan dan regulasi. Organisasi kesehatan harus terus memantau perubahan ini dan memastikan kepatuhan dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. **Kesulitan Penilaian Aset:** Penilaian aset kesehatan, seperti nilai pasien atau nilai piutang, seringkali rumit dan memerlukan metode penilaian yang tepat.
3. **Perubahan Model Bisnis:** Perubahan dalam model bisnis kesehatan, seperti transisi dari pembayaran berbasis fee-for-service ke pembayaran berbasis nilai (value-based payment), mengubah cara pendapatan dan biaya direkam dan dilaporkan.
4. **Teknologi dan Data:** Penggunaan teknologi informasi kesehatan dan pengumpulan data yang besar

menghasilkan tantangan dalam mengelola dan menganalisis data keuangan dengan efektif.

5. **Biaya Kesehatan yang Meningkat:** Meningkatnya biaya kesehatan dan tekanan untuk mengendalikannya mempengaruhi perencanaan keuangan dan akuntansi di lembaga kesehatan.

### **15.6.2 Perubahan dalam Akuntansi Kesehatan:**

1. **Penggunaan Standar Akuntansi Baru:** Standar akuntansi seperti ASC 606 (Revenue from Contracts with Customers) memengaruhi cara lembaga kesehatan mengakui pendapatan dari pasien dan pihak ketiga, memerlukan perubahan dalam proses akuntansi.
2. **Perkembangan Teknologi:** Penggunaan perangkat lunak akuntansi canggih dan analisis data membantu organisasi kesehatan untuk mengelola dan menganalisis data keuangan dengan lebih efisien.
3. **Transisi ke Akuntansi Berbasis Nilai:** Banyak organisasi kesehatan bergerak menuju model pembayaran berbasis nilai yang mengharuskan akuntansi yang lebih canggih dan pemantauan hasil pasien dalam jangka panjang.
4. **Audit Internal yang Kuat:** Perubahan dalam tuntutan pelaporan dan regulasi telah mendorong organisasi kesehatan untuk memiliki fungsi audit internal yang lebih kuat.

## Daftar Pustaka

- David W. Young, D. B. A. (2022). *Management Accounting in Healthcare Organizations*. The Crimson Press.
- Dr .C .K. Gomathy, Ms. Lekh Rajeswari, Ms.UTS Abhiroopika, & Ms. U. Sudha Mounika. (2023). Organizational Behaviour in Hospital Management and Health Care. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*.
- Louis C. Gapenski. (2018). *Healthcare Finance : An Introduction to Accounting and Financial Management*. AUPHA/HAP.
- Steven A. Finkler, Thad D. Calabrese, & David M. Ward. (2020). *Accounting Fundamentals for Health Care Management*. Jones & Bartlett Learning.
- William N. Zelman, Michael J. McCue, Noah D. Glick, & Marci S. Thomas. (2014). *Financial Management of Health Care Organizations* . Jossey-Bass.



# BAB

# 16

## PROBLEMATIKA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA

Oleh Ummu Kalsum, S.ST., M.Ak.



### 16.1 Kompleksitas Regulasi

**K**ompleksitas regulasi adalah salah satu masalah utama yang dihadapi dalam akuntansi sektor publik di Indonesia. Hal ini mencakup berbagai peraturan, pedoman, dan kebijakan yang mengatur berbagai aspek akuntansi dan pelaporan keuangan sektor publik (Parisi, 2017). Berikut ini beberapa poin terkait kompleksitas regulasi dalam konteks akuntansi sektor publik.

#### 16.1.1 Masalah dalam Kompleksitas Regulasi

1. Banyaknya Peraturan: Seiring berjalannya waktu, pemerintah pusat dan daerah di Indonesia telah menerbitkan banyak peraturan terkait akuntansi sektor publik. Hal ini mencakup peraturan dan Kementerian

Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta peraturan daerah yang berbeda-beda. Kebanyakan dari peraturan ini terus berubah dan berkembang seiring waktu.

2. **Tingkat Kepastian:** Beberapa peraturan tidak selalu memberikan tingkat kepastian yang cukup tentang pengukuran, pengakuan, dan penyajian berbagai transaksi keuangan. Hal ini dapat menyulitkan entitas sektor publik dalam menentukan bagaimana harus mengelola aset dan liabilitas serta bagaimana melaporkan informasi keuangan dengan benar.
3. **Standar Akuntansi Internasional:** Pemerintah Indonesia telah mengadopsi standar akuntansi internasional dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik.
4. **Pelaporan dan Pemantauan:** Entitas sektor publik harus memahami persyaratan pelaporan yang berbeda untuk berbagai jenis dana dan program. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat menjadi sangat penting untuk memenuhi persyaratan regulasi.
5. **Audit dan Pemeriksaan:** Audit dan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP seringkali berdasarkan pada regulasi yang rumit. Entitas sektor publik harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan proses pelaporan terpenuhi agar dapat lolos dari pemeriksaan.

### **16.1.2 Cara Mengatasi Kompleksitas Regulasi**

Untuk mengatasi kompleksitas regulasi, entitas sektor publik di Indonesia dapat mengambil langkah-langkah berikut:

1. **Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan:** Menyediakan pelatihan yang cukup kepada staf akuntansi untuk memastikan pemahaman yang baik tentang regulasi terbaru dan standar akuntansi internasional.

2. Penggunaan Konsultan dan Ahli: Menggunakan jasa konsultan atau ahli akuntansi dapat membantu dalam menginterpretasikan regulasi dan mengembangkan kebijakan dan prosedur yang sesuai.
3. Sistem Informasi dan Teknologi: Menginvestasikan dalam sistem informasi dan teknologi yang canggih dapat membantu dalam otomatisasi dan pelaporan yang lebih tepat waktu dan akurat.
4. Kolaborasi: Berkolaborasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, BPK, dan BPKP, untuk memahami dengan lebih baik bagaimana melaksanakan regulasi dan pelaporan yang sesuai.
5. Pemantauan Berkala: Melakukan pemantauan berkala terhadap perubahan regulasi dan memastikan kepatuhan yang konsisten.

## **16.2 Ketidakpastian Pendanaan**

Ketidakpastian pendanaan adalah masalah yang seringkali dihadapi oleh entitas sektor publik, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga publik lainnya. Hal ini mencakup ketidakpastian dalam sumber-sumber pendapatan, alokasi anggaran, dan perubahan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan entitas sektor publik untuk merencanakan dan melaksanakan program-programnya (Jaelani, 2017).

## **16.3 Akuntabilitas dan Transparansi**

Akuntabilitas dan transparansi adalah dua konsep kunci dalam tata kelola yang baik, terutama dalam sektor publik dan organisasi non-profit. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan integritas, efisiensi, dan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan dana publik dan pengelolaan organisasi (Andersson, 2008).

### **17.3.1 Akuntabilitas (Accountability)**

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya yang mereka tangani. Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas berarti bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan tindakan dan penggunaan dana publik kepada masyarakat, pemangku kepentingan, atau badan pengawas. Hal ini mencakup:

1. Akuntabilitas Keuangan: Memastikan bahwa anggaran dan keuangan publik digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas Kinerja: Membuktikan bahwa tujuan dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi publik telah dicapai dengan efektif.
3. Akuntabilitas Etika: Memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat atau petugas publik adalah etis dan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku

### **16.3.2 Tranparansi (Transparency)**

Transparansi mengacu pada keterbukaan dan keterlacakan informasi terkait tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi publik. Hal ini melibatkan peningkatan akses masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan, anggaran, tindakan, dan penggunaan sumber daya publik. Hal ini mencakup:

1. Pemberian Informasi: Menyediakan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada masyarakat tentang bagaimana sumber daya publik digunakan dan bagaimana keputusan dibuat.

2. Partisipasi Publik: Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan mereka kesempatan untuk memberikan masukan dan umpan balik.
3. Pengawasan Independen: Mendukung badan pengawasan independen dan media yang bebas untuk mengawasi tindakan dan penggunaan dana publik.

Berikut merupakan tabel yang membandingkan akuntabilitas dengan transparansi.

**Tabel 16.1** Akuntabilitas dan Transparansi

<b>Aspek</b>	<b>Akuntabilitas</b>	<b>Transparansi</b>
Definisi	Kewajiban individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan dan penggunaan sumber daya mereka.	Keterbukaan dan keterlacakan informasi terkait tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi publik.
Tujuan	Menciptakan pertanggungjawaban dan integritas dalam tindakan dan penggunaan sumber daya.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintah atau organisasi.
Dampak	Meningkatkan transparansi keuangan dan manajemen, mengurangi risiko,	Meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat,

	meningkatkan kepercayaan.	meningkatkan kepercayaan, mengurangi korupsi.
--	---------------------------	---

## 16.4 Sumber Daya Manusia (Human Resources)

Sumber daya manusia (SDM) adalah komponen penting dalam setiap organisasi atau entitas, baik di sektor publik maupun swasta. Pengelolaan SDM yang efektif memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja.

Sumber daya manusia merujuk pada individu-individu yang bekerja dalam organisasi atau entitas tertentu. Hal ini meliputi semua aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja, termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, kompensasi, manajemen kinerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif (Zeuch, 2016).

## 16.5 Teknologi dan Sistem Informasi

Teknologi dan Sistem Informasi (SI) adalah elemen penting dalam dunia bisnis, pemerintahan, dan masyarakat modern. Mereka memainkan peran sentral dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemampuan pengambilan keputusan

### 16.5.1 Pengertian Teknologi Informasi (TI)

Teknologi Informasi (TI) mengacu pada penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, jaringan, dan berbagai teknologi terkait untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mentransmisikan informasi. TI juga mencakup konsep-konsep seperti keamanan siber, analitika data, dan teknologi berbasis cloud.

### 16.5.2 Penggunaan TI dalam Bisnis

Dalam dunia bisnis, TI digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan rantai pasokan, meningkatkan

interaksi pelanggan, dan mendorong inovasi. Hal ini termasuk penggunaan perangkat lunak ERP (Enterprise Resource Planning), e-commerce, manajemen relasi pelanggan (CRM), dan banyak lagi.

### **16.5.3 Penggunaan SI dalam Pemerintahan**

Sistem Informasi (SI) dalam konteks pemerintahan sering digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengelola data penduduk, mengelola keuangan publik, dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan pemerintah.

### **16.5.4 Keamanan dan Privasi TI**

Dengan peningkatan penggunaan TI, keamanan siber dan privasi menjadi perhatian utama. Perusahaan dan pemerintah perlu mengembangkan strategi keamanan yang kuat untuk melindungi data dan sistem mereka dari ancaman siber (Laudon & Laudon, 2004).

## **16.6 Ketidakpastian Ekonomi dan Krisis Keuangan**

Ketidakpastian ekonomi dan krisis keuangan adalah dua aspek yang sangat memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara dan dampaknya bisa dirasakan di berbagai sektor (Reinhart & Rogoff, 2009). Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai ketidakpastian ekonomi dan krisis keuangan.

### **16.6.1 Ketidakpastian Ekonomi**

Ketidakpastian ekonomi merujuk pada tingkat ketidakpastian atau ketidakjelasan yang ada dalam perkiraan atau proyeksi ekonomi di masa mendatang. Hal ini melibatkan ketidakpastian terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara.

Ketidakpastian ekonomi bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi pasar keuangan, perubahan kondisi global, perubahan dalam pasar

tenaga kerja, dan peristiwa tak terduga seperti bencana alam atau krisis kesehatan.

Ketidakpastian ekonomi dapat memengaruhi keputusan investasi, pengeluaran konsumen, dan kinerja bisnis. Tingginya ketidakpastian dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan volatilitas pasar.

### 16.6.2 Krisis Keuangan

Krisis keuangan adalah situasi darurat di mana sistem keuangan suatu negara atau wilayah menghadapi masalah serius yang mengancam stabilitasnya. Hal ini dapat mencakup runtuhnya lembaga-lembaga keuangan, krisis utang, penurunan nilai tukar, atau krisis likuiditas.

Krisis keuangan bisa dipicu oleh berbagai faktor seperti spekulasi berlebihan, lembaga keuangan yang tidak sehat, krisis perbankan, ketidakstabilan pasar keuangan global, atau perubahan dalam kebijakan ekonomi.

Krisis keuangan dapat memiliki dampak serius pada ekonomi nasional dan global. Hal ini dapat menyebabkan resesi, penurunan lapangan kerja, devaluasi mata uang, kerugian investasi, dan masalah sosial ekonomi yang serius. Berikut merupakan materi ketidakpastian ekonomi dan krisis keuangan dalam bentuk tabel.

**Tabel 16.2** Ketidakpastian Ekonomi dan Krisis Keuangan

<b>Aspek</b>	<b>Ketidakpastian Ekonomi</b>	<b>Krisis Keuangan</b>
Definisi	Tingkat ketidakjelasan dalam proyeksi dan perkiraan ekonomi masa depan.	Situasi darurat yang mengancam stabilitas sistem keuangan suatu negara atau wilayah.

Penyebab	Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi pasar, peristiwa yang tak terduga.	Spekulasi berlebihan, masalah perbankan, perubahan kebijakan ekonomi, dan faktor lainnya.
Dampak	Memengaruhi keputusan investasi, pengeluaran konsumen, dan kinerja bisnis	Resesi, pengangguran, devaluasi mata uang, kerugian investasi, masalah sosial ekonomi.

### 16.7 Standar Akuntansi Internasional

Standar Akuntansi Internasional (International Financial Reporting Standards, IFRS) adalah seperangkat standar akuntansi yang digunakan secara global untuk mempersatukan pelaporan keuangan perusahaan. IFRS dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan di seluruh dunia.

Tujuan utama IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan memberikan informasi relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan. Hal ini membantu investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat keputusan ekonomi.

Banyak negara telah mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi mereka. Namun, tingkat adopsi dan penerapan dapat bervariasi dari suatu negara ke negara lain (Bensadon & Praquin, 2016).



**Gambar 16.1** IFRS (International Financial Reporting Standards)

## DAFTAR PUSTAKA

- Andersson, K. (2008). *Transparency and Accountability in Science and Politics: The Awareness Principle*. Palgrave Macmillan UK. <https://books.google.co.id/books?id=MywfaQAAIAAJ>
- Bensadon, D., & Praquin, N. (2016). *IFRS in a Global World: International and Critical Perspectives on Accounting*. Springer International Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=vacqDAAAQBAJ>
- Jaelani, A. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues Fiscal Policy in Indonesia: Analysis of State Budget 2017 in Islamic Economic Perspective. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(5), 14–24. <http://www.econjournals.com>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2004). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Prentice Hall. <https://books.google.co.id/books?id=KD8ZZ66PF-gC>
- Parisi, F. (2017). *The Oxford Handbook of Law and Economics: Volume 3: Public Law and Legal Institutions*. OUP Oxford. <https://books.google.co.id/books?id=JWC1DgAAQBAJ>
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press. <https://books.google.co.id/books?id=ak5fLB24ircC>
- Zeuch, M. (2016). Handbook of human resources management. In *Handbook of Human Resources Management*. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-44152-7>



## BIODATA PENULIS



### **Ari Purwanti**

Dosen Akuntansi  
Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial  
Universitas Dian Nusantara  
e-mail: [aripurwanti2501@gmail.com](mailto:aripurwanti2501@gmail.com);  
[ari.purwanti@undira.ac.id](mailto:ari.purwanti@undira.ac.id)

**Dr. Ari Purwanti, Ak, CA, CPMA, CRMP, CSRA, CERA, CIBA.,** lahir di Jakarta, 1 Januari 1977, memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang konsisten di Universitas Indonesia. Dimulai dari mengambil jurusan akuntansi dalam diploma perbankan di Politeknik Universitas Indonesia, Program Sarjana Ekstensi Universitas Indonesia dengan jurusan Manajemen Keuangan, Magister Akuntansi Universitas Indonesia dengan jurusan Akuntansi Manajemen, dan Program Doktoral Akuntansi pada Program

Pascasarjana Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dengan menggunakan semua pengetahuan dan keterampilan serta sertifikasi profesi (Ak, CA, CPMA, CRMP, CSRA, CERA, CIBA), semua pekerjaan telah dilakukan terkait dengan akuntansi keuangan dan manajemen, diantaranya praktisi di bidang Akuntansi Keuangan dan Manajemen, Trainer, Konsultan, dan Dosen Akuntansi dan Keuangan. Untuk memenuhi tugas dan kewajiban sebagai dosen, penulis melakukan penelitian di bidang akuntansi, keberlanjutan, SDGs, tata kelola perusahaan, akuntansi Islam, dan keuangan. Penulis juga menulis beberapa buku tentang akuntansi, metode penelitian, perpajakan, penganggaran, dan akuntansi zakat



### **Wildoms Sahusilawane, SE., M.Si.**

Saat ini merupakan Dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka dengan penempatan di UT Ambon. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Akuntansi dan Magister Ilmu Ekonomi (M.Si) pada Universitas Pattimura Ambon dengan peminatan Akuntansi Sektor Publik. Sejak tahun 2009 sudah aktif melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik sebagai pengajar, narasumber, instruktur, peneliti, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keilmuan dan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ). Selain menjadi Dosen, aktif juga dalam berbagai organisasi profesi sebagai anggota seperti, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP), Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), dan Pengurus Wilayah Maluku Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI). Wildoms Sahusilawane dapat dihubungi melalui email:

wildoms@ecampus.ut.ac.id.



**Lia Dama Yanti, SE., M.Akt.**

Dosen Akuntansi  
Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma

Penulis lahir di Tangerang tanggal 1 November 1982. Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis, Universitas Buddhi Dharma. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Buddhi tahun 2010 dan melanjutkan S2 pada jurusan Akuntansi Universitas Budi Luhur tahun 2015.

Penulis menekuni bidang Penelitian dan pengajaran di bidang Akuntansi. Karya tulis yang pernah dihasilkan oleh penulis yaitu Buku berjudul Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 tahun 2022.



## **Yunia Oktari, SE., M. Akt**

Dosen Program Studi Akuntansi  
Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma

Penulis lahir di Tangerang tanggal 05 Oktober 1990. Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi, Universitas Buddhi Dharma. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Keuangan dan Perpajakan di STIE Buddhi (Universitas Buddhi Dharma) pada Tahun 2011.

dan melanjutkan S2 pada Tahun 2014 di Universitas Budi Luhur Jakarta Jurusan Akuntansi Keuangan. Sejak tahun 2016 hingga saat ini penulis menjadi dosen tetap di Universitas Buddhi Dharma Tangerang Banten, program studi Akuntansi.



**Lilis Setyowati, SE., M.Si., Ak., CA**

Dosen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Penulis lahir di Demak tanggal 7 Januari 1987. Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro. Setelah lulus dari SMKN 9 Semarang, melanjutkan pendidikan S1 pada Universitas Dian Nuswantoro Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Universitas Sebelas Maret Surakarta Jurusan Akuntansi. Penulis menekuni bidang Penelitian dan fokus keilmuan kompetensi Akuntansi. Beberapa mata kuliah yang diampu antara lain Pengantar Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Laboratorium Akuntansi, dan Matematika Keuangan. Penulis juga aktif dalam melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional. Email [lilis.setyowati@dsn.dinus.ac.id](mailto:lilis.setyowati@dsn.dinus.ac.id).



## **Ikhyanuddin, S.Si., S.Akun., M.Acc.**

Dosen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

Penulis lahir di Banda Aceh tanggal 25 September 1972. Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada pada Tahun 1998 dengan gelar S.Si. dan S1 pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka pada Tahun 2022 dengan gelar S.Akun. serta melanjutkan S2 pada Prodi Magister Akuntansi (MAKSI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011 dengan gelar M.Acc. Sejak Tahun 2016 menjadi dosen tetap PNS pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh. Penulis menekuni bidang Penelitian dan Pendidikan dengan konsentrasi Akuntansi Sektor Publik. Penulis mengampu Mata Kuliah sebagai Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Akuntansi Entitas Mikro kecil dan Menengah, Pengantar Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi.



**Dr. Sugianto, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS., CGAA**  
Dosen Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik

Sejak tahun 2006 menjadi dosen tetap pada Jurusan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tadulako hingga saat ini. Pada tahun 2011 menyelesaikan S2 di Universitas Hasanuddin Makassar dan pada tahun 2022, penulis menyelesaikan Program Doktor Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Penulis saat ini memiliki hobi di dunia fotografi dan juga banyak terlibat dalam melakukan riset yang terkait dengan aspek Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keperilakuan dan Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Penulis juga aktif pada kegiatan sosial dan menjadi pengurus di beberapa Yayasan Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan.

Email Penulis: [sugisyam@gmail.com](mailto:sugisyam@gmail.com)



## **Ernawaty Usman**

Dosen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Tadulako

Ernawaty Usman, lahir di Ujung Pandang, 02 Pebruari 1974. Sejak tahun 2004 menjadi salah satu dosen pada Universitas Tadulako. Tahun 2009 melanjutkan pendidikan pada program Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin dan selesai pada tahun 2011. Tahun 2022 penulis menyelesaikan program Doktor Ilmu Akuntansi, konsentrasi Akuntansi Manajemen Sektor Publik pada Universitas Brawijaya.

Beberapa karya ilmiah dalam bentuk artikel yang diterbitkan baik pada jurnal nasional maupun international diantaranya adalah : Budget Participation and Performance of Local Government Bureucrats: The Role of Budget Politik (2022), Big artificial intelligence Data revolution for Coronavirus Outbreak (2022), The Effect Of Budget Participation On Budgetary Slack With Information Asymmetry And Clarity Of Budget Target As Moderating Variable. (2019), The Effect Of Budget Participation On Budgetary Slack (2018), Leadership Styles In Budgeting Participation To Support Managerial Performance (2016).

Anggaran Partisipatif Dalam menunjang Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (2014) dan Analisis Budaya Organisasi Dan Asimetri Informasi Dalam Senjangan Anggaran (2012), The effect of organizational culture, competence and motivation on the SMEs performance in the Covid-19 post pandemic and digital era (2023)

Beberapa artikel yang diterbitkan pada Proceedings of the 2nd Lekantara Annual Conference on Public Administration ditahun 2023 diantaranya The Role of Leadership, Self-Efficacy, Organizational Commitment on Employee performance of SMEs During Digital Era, Blended Learning as a Model of Learning Technology in the Digital Era and Industrial Revolution 4.0, The Effect of Job-Relevant Information, Budgetary Participation, Information Asymmetry, and Organizational Citizenship Behavior on SME Performance During ...and The Hospital Financial ROA (ROA) and Financial Distress during Probability Covid-19 Pandemic

Book Chapter Akuntabilitas Kinerja Sektor publik (2022), Akuntansi Manajemen (Teori dan Konsep Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Terkini, 2023), Akuntansi Keuangan (Konsep dan Aplikasi, 2023), Teori Akuntansi ( Pengantar dan Penerapan Konsep-Konsep Akuntansi, 2023).



**Samalua Waoma, SE., MM**

Dosen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nias Raya

Penulis Lahir di Bawogosali, 08 Desember 1981. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Faneraso Waoma dan Ibu Kharis Waoma. Penulis memiliki istri yang bernama Liciawati Laia, S.Pd dan dikaruniai tiga orang anak yakni: Aundey Salia Waoma, Andriella Salia Waoma dan Zionathan Samli Waoma. Penulis menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Saat ini juga sedang menyelesaikan program Strata Dua (S2) Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia Medan dan Strata Tiga (S3) Ilmu Manajemen pada Pasca Sarjana Universitas Gajayana Malang.



**Dr. Asri Ady Bakri, S.E., M.M., Ak., CA.**

Dosen Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muslim Indonesia

Penulis lahir di Tonasa tanggal 07 February 1972. Penulis adalah merupakan dosen tetap Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Muslim Indonesia Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Muslim Indonesia Makassar, melanjutkan S2 pada Program Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia Makassar, melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Hasanuddin Makassar, dan menyelesaikan S3 pada Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya Malang.



**Dr. Ngurah Pandji Mertha Agung Durya, SE, M.Si**

Penulis Lahir di Semarang, 23 Agustus 1970, pada tahun 1994 menyelesaikan pendidikan di S1 Ekonomi Untag Semarang, tahun 1999 menyelesaikan S2 Akuntansi UGM Yogyakarta, dan 2019 menyelesaikan S3 di Universitas Trisakti Jakarta. Penulis memiliki pengalaman sebagai konsultan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, yang dikembangkan oleh berbagai kementerian.

Penulis menekuni penelitian dibidang Akuntansi, untuk mendukung kegiatan konsultansi yang dilakukan, khususnya untuk meningkatkan kapasitas dibidang peningkatan pemberdayaan ekonomi di masyarakat.



## **Rini Novianti**

Dosen Akuntansi  
Universitas Buddhi Dharma

Penulis lahir pada tanggal 20 November 1990. Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Buddhi dan Strata 2 di Universitas Budi Luhur. Jurusan yang penulis pilih pada saat itu adalah akuntansi karena latar belakang penulis sendiri yang dari sekolah Menengah Kejuruan mengambil bidang akuntansi. Selain itu, penulis juga bekerja di salah satu Perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur yaitu zipper. Pada perusahaan ini penulis juga berprofesi sebagai akuntan. Penulis merupakan istri dari seorang pria yang juga berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Tangerang dan juga memiliki seorang anak berumur 4 tahun. Profesi dosen yang dijalani oleh penulis telah dilakukan selama kurang lebih 5 tahun. Walaupun belum lama tetapi penulis telah menulis beberapa buku , artikel dan juga jurnal selama 5 tahun ini .



## **Umi Nandiroh**

Dosen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Islam Malang

Penulis lahir di Mojokerto tanggal 12 Nopember 2023. Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Islam Malang, melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya, dan saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Manajemen Keuangan di Universitas Negeri Malang.

Penulis menekuni Penelitian dan Pengabdian di bidang Akuntansi Keuangan, Audit, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi UMKM, Akuntansi Pajak, Manajemen Keuangan.



## **Catur Ragil Sutrisno**

Dosen Prodi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan

Penulis lahir di Cilacap tanggal 12 Mei 1978. Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi, Profesi (PPAk) dan melanjutkan S2, semuanya ditempuh pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.



**Edy Susanto, S.E., M.Ak., Ak., CA., CPAI.,  
CTA., CPA (Expert)., CSRS., CSRA., CSP.,  
ASEAN CPA., CertDA.**

Dosen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muslim Indonesia

Penulis lahir di Palopo tanggal 09 September 1990. Menjadi akuntan profesional dengan Register Negara Akuntan (RNA) 11 RNA 1057, dengan bergabung menjadi Pimpinan Rekan pada Kantor Jasa Akuntan (KJA) Erwin & Edy. Menjadi auditor professional dengan No. register IAPI 2881, bergabung menjadi Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Adi & Deki. Menjadi Dosen di Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muslim Indonesia (UMI)

Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Muslim Indonesia dan melanjutkan S2 Magister Akuntansi pada Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia.



## **Ummu Kalsum, S.ST., M.Ak.**

Dosen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muslim Indonesia

Penulis dilahirkan di Ujung Pandang, 09 Desember 1989, penulis biasa di panggil dengan nama Ummu, memiliki nama lengkap “Ummu Kalsum” menyelesaikan pendidikannya pada program Diploa IV Politeknik Negeri Ujung Pandang dan Pendidikan Strata 2 di Universitas Muslim Indonesia bidang keilmuan akuntansi. Saat ini, penulis berprofesi sebagai dosen di Universitas Muslim Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Penulis merupakan anak kedua dari pasangan M. Zain irwanto dan Tuti Andriani, menikah dengan Muhammad Syharul dan dikarunia buah hati Adiba Azkia Emirate dan Sufi elmirat Adawiyah. Penulis aktif menulis, melakukan penelitian dan publikasi ilmiah dan di publikasi pada jurnal yang terdaftar dalam SINTA, selanjutnya publikasi yang dilakukan penulis dapat ditelusuri pada *google scholar* penulis “ummu kalsum UMI”. Penulis pernah bekerja sebagai staff *financial* di PT. Tunggal Mandiri Jaya Palu dan Sebagai Supervisor Di PT. Avrist Assurance. Motto hidup penulis “*Move from Convert zone, lakukan dan pasrahkan hasilnya kepada Ilahi*”.